

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENGELOLAAN
PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH METRO PUSAT**

(Tesis)

Oleh

DWI KARTIKA YANTI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENGELOLAAN
PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH METRO PUSAT**

**Oleh
Dwi Kartika Yanti**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Manajemen Pendidikan**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH METRO PUSAT

Oleh

**DWI KARTIKA YANTI
NPM 1623012006**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di sekolah dasar Muhammadiyah Metro Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Sumber data yang dijadikan sumber informasi adalah ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data hasil wawancara dan studi dokumentasi, dilanjutkan dengan mengadakan reduksi data, menyajikan data ke dalam tabel dan verifikasi data untuk mengambil kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Metro Pusat meliputi: (1) sebagai pemberi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan program sekolah, Rencana Anggaran Kerja Sekolah, kinerja dan fasilitas sekolah, (2) sebagai menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat, (3) sebagai pengawas pelayanan pendidikan di sekolah, (4) sebagai menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari masyarakat.

Kata Kunci: komite sekolah, mutu pengelolaan pendidikan

THE ROLE OF SCHOOL COMMITTEE IN IMPROVING THE QUALITY OF MANAGEMENT EDUCATION IN MUHAMMADIYAH ELEMENTARY SCHOOL OF METRO CENTER

By

**DWI KARTIKA YANTI
NPM 1623012006**

ABSTRACT

This study aims to describe the role of school committees in improving the quality of education management of Elementary schools of Muhammadiyah Metro Center. This research uses qualitative approach with type of phenomenology research. Sources of data used as sources of information are the head of the School Committee, Principal, and Deputy Head of School. Data collection techniques in this study using interviews, observation and documentation. The process of data analysis starts from reviewing all data of interview result and documentation study, followed by conducting data reduction, presenting data into table and verification data to take conclusion. The data validity technique uses triangulation. Based on the results of research on the role of school committees in improving the quality of education management of Elementary Schools of Muhammadiyah Metro Central includes: (1) as a consideration in determining school policies and programs, School Budget Plans, school performance and facilities, (2) as fundraising and educational resources of the community, (3) as supervisor of educational services in schools, (4) as follow up on complaints, suggestions, criticisms and aspirations from the community.

Keywords: school committee, quality of education management

Judul Tesis : **PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENGELOLAAN
PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR
MUHAMMADIYAH METRO PUSAT**

Nama Mahasiswa : *Dwi Kartika Yanti*

NPM : 1623012006

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
Dr. Supomo Kandar, M.S.
NIP 19540715 197903 1 001

[Signature]
Dr. Irawan Suntoro, M.S.
NIP 19650323 198403 1 003

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan
Magister Manajemen Pendidikan

Ketua Program Studi

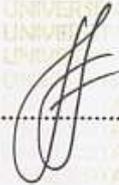
[Signature]
Dr. Riswanti Rini, M.Si.
NIP 19600328 198603 2 002

[Signature]
Dr. Sowiyah, M.Pd.
NIP 19600725 198403 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua • : Dr. Supomo Kandar, M.S.



Sekretaris : Dr. Irawan Suntoro, M.S.



Penguji Anggota : I. Dr. Dedy Hermanto Karwan, M.M.

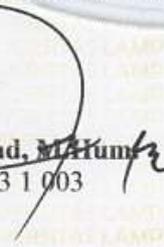


II. Dr. Sowiyah, M.Pd.

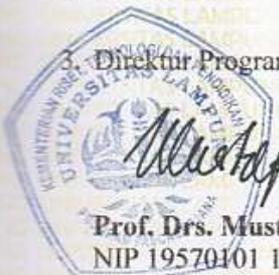
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Muhammad Fuad, M.Hum
NIP. 19590732 198603 1 003



3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP 19570101 198403 1 020



4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 31 Juli 2018

PERNYATAAN TESIS MAHASISWA

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Metro Pusat” adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan plagiat atau pengutipan atas karya penulisan orang lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia mananggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia di tuntutan sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2018

Pembuat pernyataan



Dwi Kartika yanti

NPM. 1623012006

RIWAYAT HIDUP



Dwi Kartika Yanti, dilahirkan di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Dusun Usaha Kawan Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Tanggal 11 Desember 1992. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari H. Suratman dan Hj. Murtini. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sendang Agung di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2005. Pada tahun itu peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Bandar Mataran Kabupaten Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 1 Metro dan lulus pada tahun 2011 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Metro (UM) Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2015 pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Universitas Lampung sampai saat ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah rabbil
ngalamin saya mempersembahkan hasil karya tulis saya ini untuk:

1. Almamater tercinta Universitas Lampung
2. Para dosen Prodi Magister Manajemen Pendidikan yang senantiasa sabar
memberi bimbingan
3. Bapak & Ibu tercinta, mereka adalah orang tua hebat yang telah
membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang terima kasih
atas pengorbanan, nasehat dan do'a yang tiada hentinya kalian berikan
kepadaku selama ini.
4. Seluruh rekan-rekan Magister Manajemen Pendidikan yang
membanggakan khususnya angkatan 2016 atas kerjasama dan bantuannya
yang telah diberikan kepadaku dalam segala hal.

MOTTO

Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan
untuk merubah dunia
(Nelson Mandela)

SAWANCANA

Alhamdulillah, peneliti bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah rahmat baik berupa kesempatan dan kesehatan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penulisan tesis tentang Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Metro Pusat Kota Metro.

Selain bersyukur yang peneliti sampaikan, peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan membantu penelitian dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini baik berupa bimbingan atau arahan, motivasi dan juga semangat, terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hi. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menempuh studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhamad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A. Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan perhatian dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis.
4. Ibu Dr, Riswanti Rini, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Sowiyah, M.Pd. selaku ketua Program studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lampung sekaligus sebagai penguji kedua yang telah memberikan masukan, nasihat, motivasi, dan bimbingan yang berarti dengan penuh kesabaran sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.

6. Dr. Supomo Kandar, M.S. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing pertama yang telah memberikan perhatian, bimbingan, kritik, saran, motivasi, kemudahan dan sumbangan pemikiran kepada peneliti.
7. Dr. Irawan Suntoro, M.S. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan perhatian, bimbingan, kritik, saran, motivasi, kemudahan dan sumbangan pemikiran kepada peneliti.
8. Dr. Dedy Hermanto Karwan, M. M. selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada peneliti.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Magister Manajemen Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Kedua orang tua (bapak dan ibu tercinta) Suratman dan Murtini yang telah memberikan perhatian dan doa.
11. Asep Irawan yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Seluruh teman-teman satu angkatan Manajemen Pendidikan (MP09): Aprohan Saputra, Asyer Rosandi, Budi Suhati Lestari, Kadek Setat, Leni Aprilia, Indro Sektiani, Maya Yulianti, Johan Listiawan, Juwita Rubaihan dan Waspodo Ari Wibowo semangat dan keceriaan bersama kalian adalah berkah dalam kegiatan kuliah.
13. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah mereka curahkan mendapat imbalan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga tulisan sederhana ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Amiin.

Lampung, Mei 2018

Peneliti

Dwi Kartika Yanti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat penelitian	9
1.6 Definisi Istilah	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Mutu Pengelolaan Pendidikan	12
2.1.1.1 Fungsi Pengelolaan Pendidikan	14
2.1.1.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan	18
2.1.1.3 Standar Pengelolaan Pendidikan	19
2.1.2 Peran Komite Sekolah	28
2.1.2.1 Peranan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan	33
2.1.2.2 Tujuan Komite Sekolah	34
2.1.2.3 Peran dan Fungsi Komite sekolah	36
2.1.2.4 Menggandeng Komite Sekolah untuk memperoleh Dukungan Masyarakat	38
2.1.3 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	40
2.2 Kerangka Pikir	46

III. METODE PENELITIAN

3.1 Latar Penelitian	48
3.2 Pendekatan penelitian	48
3.3 Kehadiran Penelitian	50
3.4 Sumber Data Penelitian	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	53
3.6 Teknik Analisis Data	55
3.7 Objektivitas dan Keabsahan Data	57
3.8 Prosedur Penelitian	59

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	61
4.1.1 Data SD Muhammadiyah Metro Pusat	61
4.2 Hasil Penelitian	68
4.2.1 Paparan Hasil Penelitian	68
4.2.2 Temuan Hasil Penelitian	101
4.2.3 Pembahasan	111
4.3 Hepotetik Pengembangan Model	127
4.3.1 Rasional	127
4.3.2 Landasan teori	127
4.3.3 Langkah-langkah Implementasi	129

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	132
5.2 Saran	133

DAFTAR PUSTAKA	135
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	139
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Keadaan siswa SD Muhammadiyah Metro Pusat	6
3.1 Responden Penelitian	52
3.2 Kode Penelitian	53
4.1. Keadaan Guru SD Muhammadiyah Metro Pusat	64
4.2. Keadaan siswa SD Muhammadiyah Metro Pusat	66
4.3. Keadaan Sarana dan Prasarana SD Muhammadiyah Metro Pusat	66
4.4. Matrik Peran Komite Sekolah Memberi Pertimbangan	79
4.5. Matrik Peran Komite Sekolah dalam Menggalang Dana.....	88
4.6. Matrik Peran Komite Sekolah Sebagai Pengawas	95
4.7. Matrik Peran Komite Sekolah dalam menindaklanjuti keluhan dan saran	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Kerangka Pikir Penelitian	47
3.1. Teknik Analisis Data	57
3.2. Tringulasi	58
4.1. Struktur Organisasi SD Muhammadiyah Metro Pusat	67
4.2. Diagram konteks Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan.....	103
4.3. Diagram konteks Peran Komite Sekolah dalam Menggalang Dana	106
4.4. Diagram Konteks Peran Komite Sekolah sebagai Pengawas	108
4.5. Diagram Konteks Peran Komite Sekolah dalam menindaklanjuti keluhan dan saran	110
4.6. Langkah-langkah Peran Komite Sekolah	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Kisi-kisi Penelitian	140
2.	Pedoman Wawancara	142
3.	Daftar Observasi	145
4.	Daftar Dokumentasi	146
5.	Transkrip Wawancara Penelitian	147
6.	Dokumentasi SD Muhammdiyah Metro Pusat	165
7.	Surat Izin Penelitian	173
8.	Surat Keputusan Pengurusan Komite Sekolah	175
9.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah	177

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendidikan merupakan elemen penting pada suatu negara untuk mengembangkan sumber daya manusia, oleh karena itu pendidikan harus lebih diperhatikan, karena dapat dijadikan sebagai alat atau tujuan dalam perjuangan mencapai cita-cita bangsa. Untuk itu setiap program pendidikan harus diusahakan secara optimal dan maksimal dalam rangka pengembangan kepribadian, menanamkan pengetahuan dan meningkatkan peserta didik.

Kebutuhan tersebut khususnya mencapai cita-cita bangsa, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan harapan dapat menghasilkan warga negara yang taqwa, cerdas, terampil juga sehat jasmani dan rohani, harus ditegakkan dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 3

“...Pendidikan nasional yakni membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab.”

Mencapai paparan di atas UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 3, perlu adanya pendidikan yang bermutu pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan

mutu manajemen sekolah. Namun berbagai indikator mutu pengelolaan pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti, misalnya kurangnya fasilitas pembelajaran. Berdasarkan masalah ini maka dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan selain melalui cara-cara yang di atas, juga perlu adanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian yang berorientasi pada mutu. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas pendidikan.

Menurut Mulyasa (2013: 159) faktor-faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata adalah:

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education function atau *input-output* analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila *input* seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (*output*) secara otomatis akan terjadi. Tetapi dalam kenyataan mutu pendidikan yang kita harapkan tidak terjadi. Itu semua kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat

panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat.

Faktor ketiga, peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedangkan dukungan-dukkungan lain seperti pemikiran, moral dan barang/jasa kurang diperhatikan.

Berdasarkan kenyataan diatas, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan khususnya peningkatan peran serta masyarakat (orang tua siswa) dalam berbagai program pendidikan. Peran serta dan dukungan masyarakat baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka dibentuklah suatu badan yakni Komite Sekolah (Suparlan, 2008: 205).

Keberadaan komite sekolah ini telah mengacu kepada Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah, (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dan (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Menurut keputusan Mendiknas, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Dalam penamaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah

masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, majlis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang telah disepakati bersama (Hasbullah, 2006: 89).

Berdasarkan Keputusan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Pasal 3, komite sekolah berperan untuk:

1. Pemberi pertimbangan dalam menentukan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
3. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah.
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari orang tua/wali dan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Permendikbud No. 75 Tahun 2016, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya dalam bentuk konsep dan wacana, tetapi lebih pada *action* di SD Muhammadiyah Metro Pusat.

Berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 bahwa komite sekolah berfungsi dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan dan menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Namun dalam realitasnya selama ini partisipasi masyarakat dalam pendidikan lebih pada tataran konsep, wacana dan masih jauh dari apa yang diharapkan (Sukmadinata dkk, 2008:7). Dari berbagai pengalaman dan kenyataan-kenyataan

ternyata dalam pelaksanaan peran komite sekolah tidak mudah. Hal ini terjadi karena masih adanya paham masyarakat terhadap pola lama dimana seluruh program selalu bersifat dari atas ke bawah tidak menghiraukan keinginan dari masyarakat sekitarnya. Sering kali terjadi kesalahpahaman bahwa pendidikan hanyalah tugas guru dan pemerintah, sedangkan masyarakat tidak pernah merasa memiliki.

Masyarakat tidak pernah merasa bertanggung jawab, padahal merupakan milik bersama, kewajiban bersama dan tanggung jawab bersama yang harus dipikul bersama-sama. Sebagai tindak lanjut surat keputusan Permendikbud tentang komite sekolah itu telah dilakukan kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional pelaksanaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, organisasi semacam itu, yang benar-benar berhasil mampu melakukan peran dan fungsinya secara baik, jumlahnya amat kecil (Pantjastuti dkk, 2008: 84).

Memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk: 1) saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja, 2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing, 3) kerja sama

yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah (Mulyasa, 2013: 187).

Berdasar pernyataan diatas peneliti ingin melihat bagaimana peran komite sekolah di SD Muhammadiyah Metro Pusat saat ini, karena di SD Muhammadiyah Metro Pusat sangat diminati para orang tua wali murid agar anaknya bisa bersekolah di SD Muhammadiyah Metro Pusat, tetapi dengan peminat yang banyak SD Muhammadiyah membatasi penerimaan peserta didik baru, berikut adalah tabel keadaan siswa SD Muhammadiyah Metro pusat pada dua tahun terakhir.

Tabel 1.1. Keadaan siswa SD Muhammadiyah Metro Pusat

NO	KELAS	2016/2017			2017/2018		
		Pria	Wan	Jml	Pria	Wan	Jml
1	I	113	98	211	119	111	230
2	II	129	109	238	113	101	214
3	III	109	118	227	126	111	237
4	IV	101	129	230	113	119	232
5	V	100	122	222	100	129	229
6	VI	100	108	208	97	123	220
Jumlah :		652	684	1336	668	694	1362

Sumber: Data Dokumentasi Februari Tahun 2018

Berdasarkan pernyataan diatas, maka di pandang perlu untuk mendiskripsikan bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat dan dilihat dari keberhasilan proses pembelajaran akademik/ non akademik SD Muhammadiyah terlihat saat siswa SD Muhammadiyah mendapat nilai tertinggi Ujian Nasional (UN) se-lampung, dan berbagai prestasi lomba yang diraih siswa/ siswi SD Muhammadiyah saat ini misalnya: O2SN Pencak Silat (Pi) juara satu tingkat kota,

FLS2N Pidato juara dua tingkat kota dan FLS2N Cipta Puisi juara satu tingkat provinsi. Sehingga peneliti ingin melihat seberapa besarkah peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat dan peran-peran tersebut berdasarkan Keputusan Permendikbud No.75 Tahun 2016.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat.

Fokus penelitian ini di jabarkan dalam subfokus penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di sekolah.
- 1.2.2 Peran komite sekolah sebagai penggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan.
- 1.2.3 Peran komite sekolah sebagai pengawas pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di sekolah.
- 1.2.4 Peran komite sekolah sebagai menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi orang tua/wali dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan.

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian secara umum adalah bagaimana Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat. Secara khusus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan?
- 1.3.2 Bagaimana peran komite sekolah sebagai penggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan?
- 1.3.3 Bagaimana peran komite sekolah sebagai pengawas pelayanan pendidikan di sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan?
- 1.3.4 Bagaimana peran komite sekolah menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi orang tua/wali dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan peran komite sekolah sesuai Keputusan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang:

- 1.4.1 Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat.
- 1.4.2 Peran komite sekolah sebagai penggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat.
- 1.4.3 Peran komite sekolah sebagai pengawas pelayanan pendidikan di sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat.

1.4.4 Peran komite sekolah sebagai menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi orang tua/wali dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan kajian dan konsep yang mendalam tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan, memberikan gambaran umum mutu pengelolaan pendidikan dalam perbaikan Manajemen Pendidikan dan diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lain, serta diharapkan mampu meningkatkan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan sesuai dengan pengelolaan pendidikan.

1.5.2 Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

1.5.2.1 Komite sekolah, dapat meningkatkan atau menjalankan peran-peran yang harus dilakukan dan kinerja dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di sekolah.

1.5.2.2 SD Muhammadiyah Metro Pusat, dapat memberikan fasilitas dan memfasilitasi komite sekolah untuk melakukan peran-peran dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan.

1.5.2.3 Orang tua siswa, agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat.

1.6 Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari adanya salah tafsir dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

- 1.6.1 Mutu pengelolaan pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
- 1.6.2 Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
- 1.6.3 Manajemen Berbasis Sekolah merupakan satu kesatuan dari sistem kerja manajemen di sekolah, yang berkaitan satu dengan yang lain. Sistem itu terbagi dalam beberapa bagian yang disebut komponen.
- 1.6.4 Peran komite sekolah adalah peningkatan mutu pelayanan pendidikan berupa perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- 1.6.5 Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

1.6.6 Pelayanan pendidikan yang bermutu adalah pemberian layanan jasa pendidikan di sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada para siswa di sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa.

1.6.7 Hubungan masyarakat dan sekolah adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha dalam mengadakan pembinaan pertumbuhan dan pengembangan murid-murid di sekolah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Mutu Pengelolaan Pendidikan

Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Kualitas sekolah dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi bidang lain, serta lulusannya relevan dengan tujuannya.

Menurut Sallis (2008: 1) Mutu dalam konteks pendidikan, pengertiannya meliputi *input*, proses, dan *output* pendidikan. *Input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Misalnya, sumber daya, perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedangkan sesuatu dari proses disebut *output*.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Undang-Undang Sisdiknas).

Pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia bagi suatu tipe masyarakat yang masih belum ada. Konsep system pendidikan mungkin saja berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pengalihan nilai-nilai kebudayaan (*transfer of culture value*). Konsep pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan masa lalu, sekarang, dan masa datang.

Dari beberapa definisi pendidikan di atas, pada dasarnya pengertian pendidikan yang dikemukakan memiliki kesamaan yaitu usaha sadar, terencana, sistematis, berlangsung terus-menerus, dan menuju kedewasaan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi- definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Menurut Harsono (2008: 121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan

menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

2.1.1.1 Fungsi Pengelolaan Pendidikan

1) Perencanaan

Satu-satunya hal yang pasti di masa depan dari organisasi apapun termasuk lembaga pendidikan adalah perubahan, dan perencanaan penting untuk menjembatani masa kini dan masa depan yang meningkatkan kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mondy (2010: 3) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penunjukkan staff, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik (David, 2004: 24).

Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi kepada tuntutan perubahan melalui perencanaan. Menurut Johnson (2007: 2) bahwa: *“The planning process can be considered as the vehicle for accomplishment of system change”*. Tanpa perencanaan sistem tersebut tak dapat berubah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan lingkungan yang berbeda. Dalam sistem terbuka, perubahan dalam sistem terjadi apabila kekuatan lingkungan menghendaki atau menuntut bahwa suatu keseimbangan baru perlu diciptakan dalam organisasi tergantung pada rasionalitas pembuat keputusan. Bagi sistem sosial, satu-satunya wahana untuk perubahan inovasi dan kesanggupan menyesuaikan diri ialah pengambilan keputusan manusia dan proses perencanaan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Oleh karena itu kegiatan perencanaan sebaiknya melibatkan setiap unsur lembaga pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Menurut Rusyan (2015: 56) ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, diantaranya:

- a. Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/personil lembaga pendidikan.
- b. Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan.
- c. Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil.
- d. Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya.
- e. Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/sekala pengkajian.
- f. Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formulir laporan pengajuan.
- g. Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan tempat.
- h. Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana.
- i. Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan.

2) Pengorganisasian

Tujuan pengorganisasian adalah mencapai usaha terkoordinasi dengan menerapkan tugas dan hubungan wewenang. Hasibuan (2012: 11) mendefinisikan

pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Pengorganisasian fungsi manajemen dapat dilihat terdiri dari tiga aktivitas berurutan: membagi-bagi tugas menjadi pekerjaan yang lebih sempit (spesialisasi pekerjaan), menggabungkan pekerjaan untuk membentuk departemen (departementalisasi), dan mendelegasikan wewenang (David, 2004: 25).

Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan kependidikan sebagaimana yang diharapkan. Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem yang harus terorganisir secara rapih dan tepat, baik tujuan, personil, manajemen, teknologi, siswa/member, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan faktor luar seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya.

Sutisna (2008: 22) mengemukakan bahwa organisasi yang baik senantiasa mempunyai dan menggunakan tujuan, kewenangan, dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dalam organisasi yang baik semua bagiannya bekerja dalam keselarasan seakan-akan menjadi sebagian dari keseluruhan yang tak terpisahkan. Semua itu baru dapat dicapai oleh organisasi pendidikan, manakala dilakukan upaya: 1) Menyusun struktur kelembagaan, 2) Mengembangkan prosedur yang berlaku, 3) Menentukan persyaratan bagi

instruktur dan karyawan yang diterima, 4) Membagi sumber daya instruktur dan karyawan yang ada dalam pekerjaan.

3) Pengarahan

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

4) Pengawasan

Sebagaimana menurut Ismail (2003: 5) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan.

Dalam konteks pendidikan, Depdiknas 2002 mengistilahkan pengawasan sebagai pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi yang harus diterapkan sebagai berikut:

- a. Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan.

- b. Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Para staf diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan pimpinan hanya membantu.
 - c. Pengawasan dalam bentuk saran yang efektif.
 - d. Pengawasan yang dilakukan secara periodik.
- 5) Pengembangan

Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada tahapan yang lebih kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut maka, pengembangan dalam pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya memajukan program pendidikan ini ketingkat program yang lebih sempurna, lebih luas, dan lebih kompleks. Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang di anggap perlu. Selain itu pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun.

2.1.1.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan

Ruang lingkup pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk menggali, memupuk, menggerakkan dan mempertahankan sumber daya pendidikan secara seimbang dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan melalui sistem kerja sama. Adapun bidang garapan antara lain:

- 1) Inventarisasi sumberdaya pendidikan.
- 2) Program pengelolaan sistem kerja sama disetiap bidang garapan melalui:

- a. Pengelolaan Kurikulum.
- b. Pengelolaan Kesiswaan.
- c. Pengelolaan Ketenagaan.
- d. Pengelolaan Keuangan.
- e. Pengelolaan Sarana Prasarana.
- f. Pengelolaan Potensi Masyarakat Sekitar.
- g. Pengelolaan Program SK.
- h. Pengelolaan Administrasi Sekolah.
- i. Pengelolaan BP/BK.
- j. Pengelolan Laboratorium.
- k. Pengelolaan Perpustakaan.
- l. Pengelolaan Hasil Penelitian.
- m. Pengelolaan Manajemen keterampilan.

2.1.1.3 Standar Pengelolaan Pendidikan

1) Kerangka PP No.19 Tahun 2005

Kehadiran Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 ini merupakan salah satu tuntutan dari UU No. 19 Tahun 2005 yang mengisyaratkan adanya standarisasi pendidikan di Indonesia. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, PP ini hadir untuk memenuhi Amanat UU tersebut. Selain itu, UUD 1945 sudah mengisyaratkan adanya satu sistem pendidikan yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa.

2) Kerangka Permendiknas No.19 tahun 2007

Permendiknas No.19 Tahun 2007 ini merupakan penejelasan dari PP No.19 Tahun 2005 mengenai standar pengelolaan. Permen ini membahas standardisasi, penegelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, Permendiknas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari UU sistem pendidikan nasioanal. Secara garis besar, peraturan ini hanya memuat dua pasal. Selebihnya, penejelasan dari permen ini ada pada bagaian lampiran. Dalam lampiran permen ini ada enam poin penting yang arus diperhatikan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam poin tersebut adalah:

- a. Perencanaan Program
- b. Pelaksanaan Rencana Kerja
- c. Pengawasan dan Evaluasi
- d. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah
- e. Sistem Informasi Manajemen
- f. Penilaian Khusus

3) Kandungan PP No.19 tahun 2005 dan Permendiknas No.19 Tahun 2007
PP No.19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 mengatur tentang standar nasioanal pendidikan yang ada di Indonesia.

Delapan standar tersebut diatur secara garis besar dalam PP ini, namun penjelasannya dijabarkan oleh peraturan lain. Delapan standar penidikan yang dimaksud adalah:

- a. Standar isi

Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan

kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Secara lebih rinci, standar isi diatur dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006.

b. Standar Proses

Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

e. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar dalam mengelola pendidikan dalam satu lembaga pendidikan. Dalam standar ini, pendidikan dikelola oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah. Dalam PP ini Dikdasmen menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Sedangkan Pendidikan tinggi (PT) menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian.

f. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Secara lebih rinci, standar ini diatur dalam Permendiknas No. 20 Tahun 2007. Permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Permendiknas ini terkandung beberapa poin penting, diantaranya:

a) Perencanaan Program

Perencanaan program dalam pengelolaan pendidikan meliputi: Pembuatan Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Kerja.

b) Visi sekolah/madrasah

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang (Akdon, 2006: 94).

Hax dan Majluf dalam Akdon (2006: 95) menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk sekolah. Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa datang. Dalam menentukan visi tersebut, sekolah harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. Visi sekolah menurut Permendiknas No 19 Tahun 2007 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.
 2. Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
 3. Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional.
 4. Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah.
 5. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
 6. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
- c) Misi Sekolah /Madrasah

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang (Akdon, 2006: 97). Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi.

Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi.

Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Misi sekolah menurut Permendiknas No.19 tahun 2007 harus memenuhi kriteria:

1. Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.
3. Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah.
4. Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah.
5. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah.
6. Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat.
7. Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah.

8. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
9. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

d) Tujuan Sekolah /Madrasah

Tujuan menggambarkan arahan yang jelas bagi sekolah. Perumusan tujuan akan strategi/perlakuan, arah kebijakan dan program suatu sekolah. Oleh karena itu perumusan tujuan harus memberikan ukuran lebih spesifik dan akuntabel. Perumusan tujuan menurut Permendiknas No.19 Tahun 2007 harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan), (2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, (3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah, (4) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dan (5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

e) Program/ Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah

Program merupakan implementasi dari visi, misi dan tujuan. Program yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

untuk mencapai tujuan dan sasaran (Akdon, 2006: 135). Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan program kerja sekolah berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi Permendiknas No.19 tahun 2007. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Salah satu penyebabnya antara lain masih rendahnya kualifikasi akademik tenaga pendidik dan kependidikan.

(Muhyi, 2007: 4).

4) Solusi Pemerataan Standardisasi Pengelolaan Pendidikan

Untuk menangani permasalahan tersebut, perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan baik mengenai implementasi Permendiknas No.19 tahun 2007.

Langkah-langkah kebijaksanaan yang ditempuh antara lain sebagai berikut:

1. Perlu diciptakan sistem informasi yang dapat mengkomunikasikan/ memantau perkembangan pelaksanaan Permendiknas No.19 tahun 2007 pada berbagai daerah diseluruh tanah air.
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan profesionalisme (Pembina, pengawas/ penilik, kepal sekolah, guru) agar Permendiknas No.19 tahun 2007 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

3. Mencukupi fasilitas pendukung pelaksanaan Permendiknas No.19 tahun 2007 baik oleh masyarakat maupun pemerintah (buku, alat pendidikan, dan sarana pendidikan lainnya)
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaksana pendidikan agar berfungsi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
5. Menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat memberikan kemungkinan para pelaksana pendidikan menjalankan tugasnya secara kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab.

Menciptakan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan peraturan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebaiknya sumber daya manusia yang berada di bidang tersebut merupakan administrator dan manajer pendidikan yang sesuai yang telah menempuh pengajaran dan pembekalan mengenai seluruh kegiatan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan keilmuan administrasi/manajemen pendidikan. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kondisi sekolah.

- 5) Hubungan Permendiknas No.19 tahun 2007 dengan PP No.17 Tahun 2010
Seperti yang sudah dijelaskan dalam kandungan PP No.19 tahun 2005, bahwa standar pengelolaan pendidikan dipertegas oleh beberapa peraturan, salah satunya adalah PP No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. PP ini mengatur secara luas tentang pengelolaan pendidikan, sedangkan dalam Permendiknas No.19 Tahun 2007 hanya mengatur teknis pengelolaan oleh atuan pendidikan dasar dan menengah saja. Oleh karena itu,

secara peraturan PP ini tidak menghapus peraturan sebelumnya, namun lebih mempertegas penyelenggaraan peraturan yang sudah dibentuk sebelumnya.

2.1.2 Peran Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah suatu lembaga yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, serta merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarki dengan lembaga pemerintahan yang berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Hasbullah, 2006: 90). Menurut Zamroni (2007: 63), Komite Sekolah merupakan organ semi formal yang dimiliki sekolah sebagai salah satu wujud partisipasi orang tua dan masyarakat. Pengertian Komite Sekolah lainnya dijelaskan dalam Kemdiknas (2002) sebagai berikut:

Komite Sekolah adalah badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 bahwa: (1) masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, (2) dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis, (3)

komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, dan (4) ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat (1) dan (3) tersuratkan bahwa fungsinya melalui komite sekolah masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui komite sekolah, masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan berupa perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kedudukan komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan, dan pasal 66 menyuratkan bahwa komite sekolah sebagai salah satu unsur yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 komite sekolah harus melaksanakan fungsi dan perannya sebagai berikut: (1) Memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, (2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat, (3) mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi orang tua/wali dan masyarakat.

Peran komite sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan,

mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat (Yusak, 2010: 11).

Depdiknas dalam bukunya berpartisipasi masyarakat, menguraikan tujuh peranan komite sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah yakni:

- a. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar disekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
- b. Melakukan penilaian sikap dan perilaku siswa, membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini, keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolahraga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
- c. Mencari sumber pandangan/ donatur untuk membantu siswa yang tidak mampu agar bisa bersekolah.
- d. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
- e. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
- f. Melakukan pembahasan tentang usulan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- g. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu.

Masyarakat yang merupakan lembaga ketiga, sebagai lembaga pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali peranannya.

Menurut Hasbullah (2007: 92) ada beberapa peranan dari masyarakat terhadap pendidikan (sekolah) yaitu:

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.

2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan sekolah.
3. Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang dan sebagainya.
4. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang kesekolah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik. Orang-orang yang punya keahlian khusus banyak sekali terdapat dimasyarakat, seperti petani, peternak, saudagar, polisi, dokter, dan sebagainya.
5. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Disamping buku-buku pelajaran, masyarakat memberi bahan pelajaran yang banyak sekali, antara lain seperti aspek alami industri, perumahan, transport, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.

Sagala (2009: 258) menyatakan bahwa bentuk aktivitas pelaksanaan peran Komite Sekolah antara lain dengan mendata jumlah guru serta tingkat pendidikannya yang memerlukan peningkatan dan mendata jumlah siswa serta indeks prestasinya, guru dan komite sekolah sendiri. Sagala (2009: 260), juga menyatakan bahwa Komite Sekolah dalam melaksanakan aktivitas bukanlah melakukan fungsinya secara terpisah-pisah, tetapi berlangsung secara simultan dengan mengedepankan peningkatan kualitas pendidikan tanpa memaksakan kehendak pribadi.

Komite sekolah memiliki peran dalam perogram sekolah menurut Hamzah (2010: 94), bahwa pendapatan dan pengeluaran sekolah dituangkan ke dalam

suatu neraca tahunan sekolah yang disebut RKAS, yang harus disahkan atas persetujuan pihak sekolah dan Komite Sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sehingga menjadi RKAS yang resmi. Komite sekolah memiliki peran untuk mendata jumlah guru serta tingkat pendidikannya yang memerlukan peningkatan dan mendata jumlah siswa serta indeks prestasinya, guru dan Komite Sekolah sendiri (Sagala, 2009: 258). Komite sekolah memberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, atau nasihat menunjukkan respon dan keikutsertaan dewan pendidikan dan komite sekolah memajukan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah dan di sekolah (Mulyasa, 2006: 189). Ada beberapa bentuk aktifitas dewan pendidikan dan komite sekolah antara lain: (1) memberi pertimbangan mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan tingkat kabupaten/kota, (2) memberikan pertimbangan buat guru dalam pelaksanaan tugas supaya tidak sewenang-wenang dalam menangani siswa (misalnya dalam member hukuman tetapi juga member penghargaan bagi yang berprestasi), (3) memberi pertimbangan dalam meningkatkan disiplin guru dan memberi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru, (4) memberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa (seperti olimpiade mata pelajaran, seni, dan olahraga) (Mulyasa, 2006: 190).

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan, kelompok, ataupun lembaga seperti dunia usaha dan industri. Peran serta masyarakat dalam

pendidikan akan lebih efektif karena secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, antara lain melalui komite sekolah (Matry, 2008: 10-11).

Dalam jangka panjang, pendidikan adalah proses pembudayaan, studi mutakhir membuktikan bahwa budaya sekolah (*school culture*) memegang peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Budaya sekolah yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku dan dilaksanakan oleh warga sekolah, yang mampu menumbuhkan kembangkan kesadaran diri, watak, etos kerja, disiplin kerjasama, sikap pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan, kreatifitas, produktifitas, kemampuan berfikir kritis, solideritas, toleransi, dan daya saing anak didik, untuk itu diperlukan dukungan pihak-pihak yang terkait agar sekolah dapat melaksanakannya dengan baik, khususnya dari komite sekolah (Matry, 2008: 348). Menurut Winoto bahwa pusat pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling kerjasama secara sinergis untuk peningkatan mutu pengelolaan pendidikan (Winoto, 2011: 137).

2.1.2.1 Peranan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan

Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak yang terkait khususnya dalam pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. Dalam kamus besar bahasa Indonesia di kemukakan bahwa peran atau peranan adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.

(Bahri, 2007: 19) memandang “Suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala suatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban”

Menurut Tilaar (2009) “Pengelolaan satuan pendidikan harus ada pelibatan langsung dari masyarakat yang merupakan salah satu pemegang hak maka tujuan-tujuan lembaga-lembaga pendidikan harus pula menampung apa yang di inginkan oleh masyarakat dan bukan hanya menampung apa yang di inginkan oleh birokrasi.

Dalam kaitan ini perlu ada lembaga atau struktur organisasi di lembaga-lembaga pendidikan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam memberikan investasi dalam pendidikan berupa SPP pajak, dan sebagainya, melainkan juga ikut serta dalam merencanakan kurikulum pendidikan, evaluasi pendidikan, dan hal-hal yang menyangkut proses belajar.

Oleh sebab itu salah satu aspek penting peningkatan mutu pengelolaan pendidikan adalah di perlukannya peran serta masyarakat yaitu melalui komite sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian semua lapisan masyarakat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan tersebut.

2.1.2.2 Tujuan Komite Sekolah

Komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite sekolah dapat terdiri dari setiap satuan pendidikan atau

berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan yang lain.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya wadah organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada penggunaan (*client model*), berbagi kewenangan (*power sharing and advocacy*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Menurut Mulyasa (2011: 128) tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut :

- (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.
- (2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Oleh sebab itu komite sekolah sangat dibutuhkan perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di sekolah, dan fokus kajiannya adalah bagaimana memberikan kontribusinya terhadap sekolah yang

menggandengnya, karena kualitas menjadi parameter, maka usaha perbaikan, pengembangan, dan percepatan secara konsisten harus di tingkatkan.

2.1.2.3 Peran dan Fungsi Komite sekolah

Peran dan fungsi komite sekolah adalah landasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasinya. Komite sekolah memiliki peran sebagai mitra kerja lembaga pendidikan (sekolah), diantaranya adalah sebagai penasehat sekolah, pendukung sekolah, pengontrol/pemantau, sebagai penghubung dengan stakeholders pendidikan.

Hasbullah (2006: 93) menegaskan Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

- (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. Kebijakan dan program pendidikan.
 - b. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
 - d. Kriteria tenaga pendidikan.
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan.
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- (5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- (6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- (7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah dalam tempat yang berlainan dimungkinkan untuk menggunakan sistem pendekatan pembelajaran yang berlainan. Kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan sendiri-sendiri asalkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pusat. Karena karakteristik setiap siswa juga berbeda-beda secara individual, pendekatan pembelajaran juga di mungkinkan berbeda untuk masing-masing siswa yang berlainan.

Dengan kondisi seperti itu, komite sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan siswa untuk banyak belajar sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.

Adanya sinergi antara komite sekolah dengan sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja yang membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Denagan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparan mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat di

pertanggungjawabkan. Pengembangan pendidikan secara lebih inovatif juga akan semakin memungkinkan, di sebabkan lahirnya ide-ide cemerlang dan kreatif semua pihak terkait (*stakeholder*) pendidikan yang bersangkutan.

2.1.2.4 Menggandeng Komite Sekolah untuk memperoleh Dukungan

Masyarakat

Dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat sentralistik, partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang di buat dan diimplementasikan tidak begitu di permasalahan, namun dalam konteks ekonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dewasa ini, tingginya partisipasi masyarakat dapat di jadikan tolok ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sekolah dan masyarakat merupakan *partnership* dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan.

Menurut Wibowo (2013) “Aspek tersebut yaitu Sekolah yang memiliki karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki. Makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula tingkat dedikasinya”.

Hubungan dengan masyarakat akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaan dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan secara luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi sekolah. Jadi, prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah dapat saling memberi kepuasan. Salah satu

jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk menggalang partisipasi masyarakat, menurut Mulyasa (2011:141):

- (1) Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar nasional, keagamaan dan pentas seni. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan hobi, kemampuan, dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan di sekolah.
- (2) Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut pertama kali harus dihubungi, diajak kompromi, konsultasi, dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi dalam program dan kegiatan sekolah. Tokoh tersebut mungkin berasal dari orang tua peserta didik, figur masyarakat (kiai), olahragawan, seniman, psikolog, dokter, dan pengusaha.
- (3) Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minatnya. Misalnya olahragawan dilibatkan dalam pembinaan dalam olahraga di sekolah, dokter dapat dilibatkan dalam usaha kesehatan sekolah (UKS), dan Palang Merah Remaja (PMR), psikolog dapat dilibatkan dalam kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya tokoh masyarakat tersebut dijadikan mediator masyarakat pada umumnya.
- (4) Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Misalnya PORDA, ketika minat masyarakat terhadap sedang meningkat, awal pelibatan dokter dimulai pada hari Kesehatan Nasional, atau pada saat kegiatan imunisasi di sekolah.

Oleh sebab itu peran komite sekolah dalam menjembatani kepentingan antara masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan senantiasa memerlukan kecermatan identifikasi tersebut. Ketika ada keluhan masyarakat yang masuk, ada kengganannya memanfaatkannya sebagai masukan bagi koreksi perbaikan. Pada

tingkat apa dan dengan cara bagaimana dialog publik, maka di sinilah posisi menggandeng komite sekolah untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.

2.1.3 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah salah satu strategi wajib yang ditetapkan sebagai standar dalam mengembangkan keunggulan pengelolaan sekolah. Penegasan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 ayat 1 bahwa pengelolaan satuan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Depdiknas (2007: 12) secara umum, MBS dapat di artikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Dengan otonomi yang lebih besar pula, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya sehingga sekolah lebih mandiri (Suharno, 2008: 39). Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan kemandiriannya sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Dengan pengambilan keputusan partisipatif yaitu pelibatan warga sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan maka rasa memiliki akan menyebabkan rasa tanggungjawab, dan peningkatan rasa tanggungjawab akan meningkat dedikasi warga sekolah terhadap sekolahnya. Baik peningkatan otonomi sekolah maupun pengambilan keputusan partisipatif tersebut,

kesemuanya ditujukan untuk peningkatan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku.

Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia muncul karena; 1) sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. 2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. 3) Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat (Mulyasa, 2002: 16). Melalui keterlibatan guru, orang tua dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid (Sutarto et al., 2014: 348). MBS merupakan model aplikasi manajemen institusional yang mengintegrasikan seluruh sumber internal dan eksternal dengan lebih menekankan pada pentingnya menetapkan kebijakan melalui perluasan otonomi sekolah. Sasarannya adalah mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan. Spesifikasinya berkenaan dengan visi, misi, dan tujuan yang dikemas dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan (Wikipedia, 2009).

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan satu kesatuan dari sistem kerja manajemen di sekolah, yang berkaitan satu dengan yang lain. Sistem itu terbagi dalam beberapa bagian yang disebut komponen. (Rohiat, 2008: 13)

mengemukakan komponen-komponen Manajemen Berbasis sekolah yang meliputi: 1) Konteks adalah eksternalitas sekolah berupa *demand* dan *support* yang berpengaruh pada input sekolah, 2) *Input* adalah segala sesuatu yang harus

tersedia dan siap karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, 3) Proses adalah berubahnya sesuatu menjadi ada sesuatu yang lain.

Dalam MBS sebagai sistem, proses terdiri dari: proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses evaluasi sekolah, 4) *Output* adalah hasil nyata dari pelaksanaan program MBS. Hasil nyata tersebut dapat berupa *academic achievement* maupun *non academic achievement*, dan 5) *Out come* adalah hasil MBS jangka panjang, yang berbeda dengan output yang hanya mengukur hasil MBS sesaat/ jangka pendek. Karena itu, fokus evaluasi outcome adalah pada dampak MBS jangka panjang, baik dampak terhadap individu maupun sosial.

Manajemen Berbasis Sekolah yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Menurut Mulyasa (2007: 24) MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Lebih lanjut Mulyasa (2007: 24) menyatakan bahwa MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik.. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

Nurkholis (2003: 11) merumuskan bahwa MBS adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung. Dikatakan selanjutnya bahwa dengan kewenangan yang lebih besar berada pada tingkat sekolah memiliki beberapa keuntungan seperti: (a) kebijakan dan kewenangan sekolah memiliki pengaruh langsung kepada siswa, orang tua, dan guru, (b) bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya dan pendayagunaan sumber internal sekolah, dan (c) efektif dalam melakukan pembinaan siswa seperti kehadiran, hasil belajar, moral guru dan iklim sekolah.

Menurut Myers sebagaimana dikutip Nurkholis (2003: 3) MBS adalah strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual. MBS memberi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses pendidikan dan memberi mereka tanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang anggaran, personil dan kurikulum.

Ai Shoraku (2008: 1) menyatakan Manajemen Berbasis Sekolah adalah:
“has been viewed as a means to expand local participan in decision-making that

is relevans to school, and as a way to expand access to education and improve its quality”.

MBS telah dianggap sebagai salah satu cara untuk mengembangkan partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan yang relevan di sekolah dan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan pendidikan dan meningkatkan kualitas sekolah. Pernyataan ini dapat dipahami bahwa kepala sekolah, bersama staf dan masyarakat diberikan peluang menentukan prioritas dalam memanfaatkan sumber daya untuk membuat perencanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah. Berdasarkan berbagai definisi dapat dilihat esensi MBS adalah otonomi sekolah yang lebih besar dalam mengelola sumber daya pendidikan di sekolah dengan melibatkan semua warga sekolah dan *stakeholder* untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti telah melakukan kajian terhadap hasil penelitian yang mempunyai kajian yang sama atau relevan dengan penelitian ini, yaitu: (1) penelitian Sari, E. E. P. (2014) berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite sekolah telah melaksanakan peran dalam memberikan pertimbangan berupa masukan dalam pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan sumber daya pendidikan. Komite sekolah melaksanakan peran dalam memberikan dukungan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran pendidikan, maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Komite sekolah menunjukkan peran sebagai motivator dalam mendukung program BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Komite sekolah melaksanakan peran dalam mengontrol meskipun secara pasif melalui pengecekan laporan-laporan yang diberikan oleh pihak sekolah.

Komite sekolah berperan sebagai mediator dalam menghubungkan pihak sekolah untuk dapat menjalin hubungan dengan dunia usaha atau dunia industri (DUDI). Komite sekolah menerapkan prinsip selalu berkomunikasi dan terbuka dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan untuk mendukung peningkatan mutu. (2) Penelitian Wardiah, S., Murniati & Djailani (2015) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) Program komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan meliputi: rapat rutin komite sekolah setiap semester, ikut mensahkan RKAS, menyampaikan usulan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah, namun dalam pelaksanaannya belum efektif. (b) Strategi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan diantaranya: Rapat rutin dengan warga sekolah pada setiap akhir semester, bersama-sama sekolah membuat rumusan visi dan misi sekolah, menyusun RKAS dan RAPBS serta mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik (c) Kendala komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kurangnya komunikasi antara sekolah dengan komite sekolah karena kurangnya waktu yang dimiliki oleh komite sekolah, sehingga program komite sekolah, menjadi kurang efektif. (3) Penelitian Syarif Hidayatullah (2013) hasil penelitian ini lebih banyak dari dokumentasi dan interview dengan responden Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Tata Usaha, dan Wakasek Kurikulum. Kesimpulan dari penelitian ini belum optimalnya kinerja Komite Sekolah. Perbedaan penelitian yang dilakukan Haris dengan penelitian yang sedang peneliti teliti adalah Objek penelitiannya pada tingkat SMP dan fokus penelitiannya pada bagaimana peningkatan sarana prasarana yang ada di sekolah saat ini.

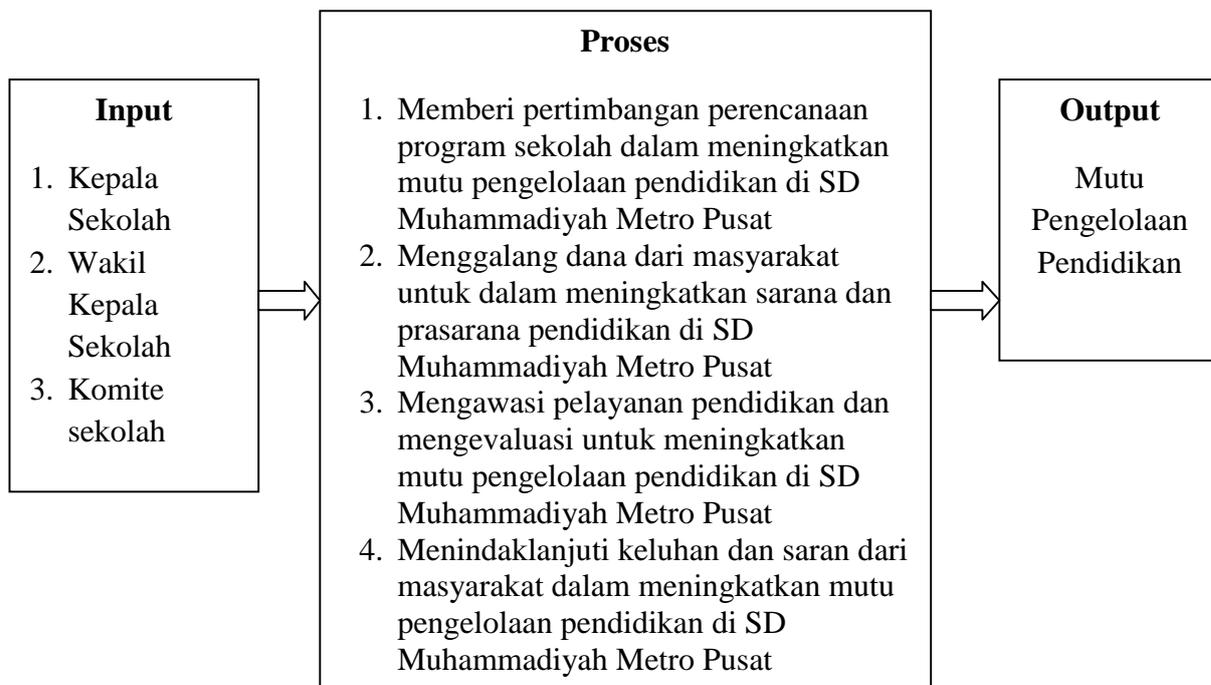
2.2 Kerangka Pikir

Perubahan paradigma pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder yang lain. Hal ini menuntut kinerja unsur-unsur penyelenggara pendidikan tersebut untuk saling aktif dan saling berpartisipasi untuk kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya organisasi yang independen yaitu komite sekolah maka peran masyarakat tersebut dapat di optimalkan. Keberadaan Komite sekolah diharapkan dapat menjawab dan mencari solusi dan permasalahan pendidikan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang ada. Sumber daya yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sangat di butuhkan dalam menunjang keberhasilan pendidikan.

Dari uraian diatas maka kerangka pikir dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Input penelitian ini adalah Komite Sekolah yang pengurusnya terdiri dari praktisi pendidikan, tokoh masyarakat dan pelaku industri yang memahami peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat. Pemahaman peran dan fungsi tersebut berakibat pada partisipasi komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi RAPBS dan program kerja sekolah. (2) Proses dalam penelitian ini adalah: (a) Komite sekolah melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan, (b) Peran komite sekolah sebagai penggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan, (c) Peran komite sekolah sebagai pengawas pelayanan pendidikan di sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan, (d) Peran komite sekolah menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi orang tua/wali dan masyarakat

dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan. (3) Output dalam penelitian ini adalah mutu pengelolaan pendidikan yang merupakan optimalisasi terhadap kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

Kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:



Gambar: 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas bahwa peran komite sekolah sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian Tesis ini adalah di SD Muhammadiyah Metro Pusat beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No 1 Desa Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

SD Muhammadiyah Metro Pusat di dasari oleh beberapa alasan sebagai berikut: Pertama peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat semakin terlihat dengan prestasi peserta didik dalam ajang perlombaan yang terus meningkat, baik dalam lomba akademik maupun nonakademik. Kedua peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan saat ini berjalan efektif, khususnya dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat atau komite sekolah dalam membantu membangun lembaga pendidikan tersebut.

3.2 Pendekan dan Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan atau mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dan menggunakan metode ilmiah. Dalam suatu penelitian harus ditetapkan metode penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya agar memperoleh tujuan yang diharapkan. Selain harus dipertanggung jawabkan kebenarannya, metode yang digunakan juga dipilih sesuai dengan objek dan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan cara memandang obyek kajian sebagai suatu sistem artinya obyek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur yang terkait dan mendeskripsikan fenomenologi yang ada (Arikunto, 2006: 209).

Meleong (2013: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu holistik (utuh), jadi tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel dan hipotesis tapi perlu memandangnya dari suatu kebutuhan.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan pada pendapat Bogdan dan Biklen: Penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari dalam, yakni: pertama, menekankan pada setting alami (natural setting) dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci; kedua, penelitian ini lebih menaruh perhatian pada proses dari pada produk; ketiga, penelitian ini berusaha mengungkap dunia makna (meaning) dibalik tindakan seseorang.

Berdasarkan paparan diatas, maka sebagai ciri khas pendekatan kualitatif ini, tidak mungkin peneliti mewakilkan kepada orang lain dalam penelitian karena peneliti sendirilah yang menjadi instrument kunci dalam menggali informasi dari subyek penelitian, dan yang menjadi key informan pada penelitian ini adalah kepala sekolah. Subyek penelitian yang dimaksud adalah pelaku utama yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang dapat diamati dari perilaku yang ditampilkan. Perilaku yang secara rutin ditunjukkan kepada orang

lain dapat berupa pendekatan, aktifitas, upaya, peran yang terartikulasikan atau teraktualisasikan oleh subyek penelitian. Kemudian peneliti memberikan penjelasan secara kualitatif dan mendalam (*verstehen*) tentang: peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan.

3.3 Kehadiran Penelitian

Salah satu keunikan dari penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama atau disebut juga instrumen kunci, jadi kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Karena peneliti dapat menyesuaikan diri terhadap setting penelitian. Sehingga penelitian dapat menjelajah keseluruhan bagian setting peneliti untuk mengumpulkan data, keputusan dapat secara cepat, gaya dan topik pembicaraan dapat berubah-ubah dan jika perlu pengumpulan data dapat ditunda.

Menurut Meleong (2013: 9) dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan-manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mendapatkan data peneliti terjun langsung dan membaur dalam komunikasi subyek penelitian untuk memahami langsung kenyataan dilapangan. Karena dengan terjun langsung ke lapangan maka peneliti dapat melihat secara langsung fenomena di lapangan.

Berikut adalah jadwal peneliti selama melakukan penelitian di SD Muhammadiyah Metro Pusat, (1) peneliti menyerahkan surat izin penelitian pada hari Kamis tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu delapan belas pukul

09.00 WIB bertemu dengan staf TU SD muhammadiyah, (2) pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas pukul 09.30-11.00 WIB peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah membahas tentang komite sekolah dalam memberikan pertimbangan, dalam RAPBS, penggalangan dana, komite sekolah sebagai pengawas, tentang menindaklanjuti keluhan masyarakat di SD Muhammadiyah, (3) pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas pukul 13.00-14.00 WIB peneliti melakukan wawancara juga dengan Komite SD Muhammadiyah membahas tentang Komite sekolah dalam memberikan pertimbangan, dan mengenai sarana dan prasarana, penggalangan dana, pengawasan terhadap sekolah, dan memberikan saran, kritik dan aspirasi SD Muhammadiyah, (4) pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu delapan belas pukul 08.00-13.00 WIB peneliti melakukan wawancara dengan Guru/selaku waka kesiswaan SD Muhammadiyah Komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam SDM, Memberi pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, partisipasi masyarakat dalam menggalang dana, langkah-langkah transparansi di SD Muhammadiyah, (5) pada hari Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu delapan belas pukul 08.00-11.00 WIB peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah membahas tentang Tentang RKAS dan SPP di Sd Muhammdiyah, (6) pada hari Senin tanggal lima Maret dua ribu delapan belas pukul 09.30-10.00 WIB bertemu dengan staf TU SD Muhammadiyah untuk mengambil surat balasan.

3.4 Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang di kumpulkan atau diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari sumbernya dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah, di SD Muhammadiyah Metro Pusat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk membantu menyelesaikan data primer berupa arsip-arsip dan dokumen dari instansi terkait. Untuk memperoleh sumber data sekunder, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data melalui informasi secara tertulis, gambar-gambar dan bagan-bagan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah susunan organisasi sekolah, susunan organisasi komite sekolah serta profil dari SD Muhammadiyah Metro Pusat.

Tabel 3.1. Responden Penelitian

No	Sumber Data	Kode	Jumlah
1	Kepala Sekolah	KS	1
2	Wakil Kepala Sekolah	WKS	2
3	Komite Sekolah	KoSe	2
Total			5

(Sumber: Data Penelitian)

Peneliti melakukan koding untuk mempermudah penelitian data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengkodean yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kode Penelitian

No.	Kategori	Kode
1.	Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	W O D
2.	Sumber Data 1. Kepala Sekolah 2. Wakil Kepala Sekolah 3. Komite Sekolah	KS WKS KoSe
3.	Fokus Penelitian Fokus penelitian pertama sampai dengan fokus penelitian ke tiga	N1 N1 sd N3

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada setiap penelitian, baik yang bersifat terbuka, diduplikasikan, maupun yang rahasia atau kalangan yang sangat terbatas selalu digunakan alat-alat pengumpulan data yang tersusun baik serta disesuaikan dengan tujuan penelitian. Relevansi teknik pengumpulan data itu tergantung pada tipe permasalahan, jenis penelitian, serta kondisi penelitian itu sendiri. Agar sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan tiga metode, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang menjawab atas pertanyaan ini (Meleong, 2013: 135). Kegiatan wawancara terhadap informasi, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan program observasi. Pedoman wawancara menjadi pemandu dalam perolehan data. Namun wawancara

tidaklah terfokus pada pedoman tersebut, tetapi akan dikembangkan sesuai kondisi lapangan pada saat wawancara berlangsung.

Hal-hal yang akan diwawancarakan dengan ruang lingkup mengenai: pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan, sebagai pengawas pelayanan pendidikan, sebagai menindaklanjuti kelusan, saran, kritik, dan aspirasi orang tua/ wali dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat. Sedangkan sumber data yang akan diwawancarai sebagai sumber utama adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah sebagai informan untuk mendapatkan informasi tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat.

Bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur, wawancara berstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data pokok permasalahan tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat serta wawancara tak berstruktur yakni wawancara di lakukan secara bebas untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara berstruktur. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara yang dapat berkembang sesuai dengan jawaban narasumber.

2. Observasi

Menurut Supardi (2006: 88) metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai subjek yang akan di teliti.

Observasi yang dilakukan peneliti terdiri dari tiga komponen diantaranya:

- a. Melakukan pengamatan berkaitan dengan lokasi atau tempat penelitian yaitu SD Muhammadiyah Metro Pusat. Dimana peneliti menemukan lokasi alamat sekolah yaitu Jl. KH. Ahmad Dahlan No 1 Desa Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- b. Pengamatan terhadap pelaku diantaranya Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah, dan Komite Sekolah.
- c. Pengamatan terhadap aktivitas diantaranya mengamati proses KBM disekolah, dan kegiatan peserta didik disekolah.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 111) teknik analisis dokumen memiliki istilah lain yaitu analisis isi (*content analysis*), mencari data mengenai file-file kepala sekolah, file organisasi, dan arsip-arsip sejarah lainnya. Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang terkait dengan sejarah berdirinya SD Muhammadiyah Metro Pusat, visi misinya, struktur organisasi dan kepengurusan sekolah, struktur komite sekolah, keadaan dan jumlah guru serta tenaga lainnya, keadaan dan jumlah siswanya dan lain-lain. Dengan demikian metode dokumentasi bermaksud mencari data dengan mengklasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengungkapkan

bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*) (Sugiono, 2012: 246).

1. Reduksi (*data reduction*)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

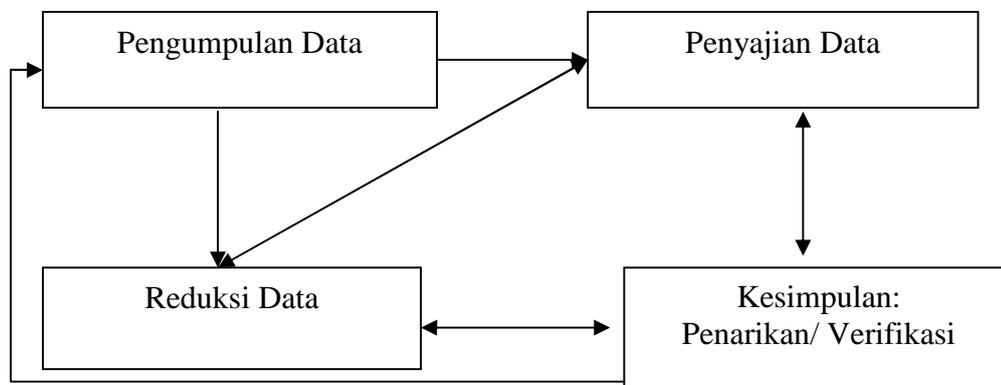
2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan kolom–kolom dalam sebuah matrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis bentuk data yang dimasukkan dalam kotak–kotak matrik dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.

3. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan pola–pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin atau sebab ada proporsi (Rachman, 2005: 3). Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini (Sugiono, 2012: 247).

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data dapat digambarkan, sebagai berikut:



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data
(Sumber: Miles dan Huberman 2004: 20)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data.

Karena banyaknya data yang dikumpulkan maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

3.7 Objektivitas dan Keabsahan Data

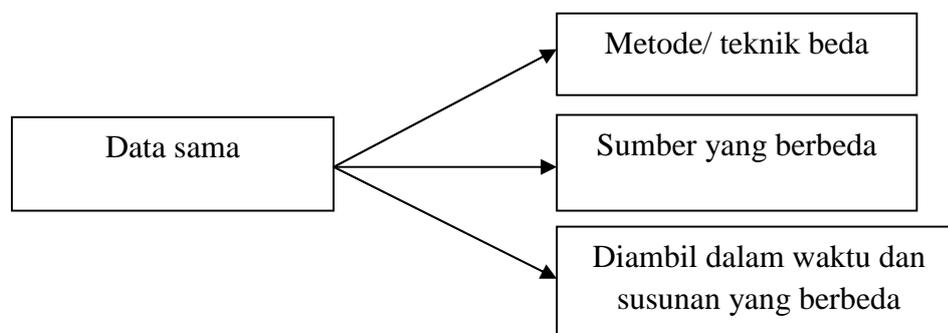
Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*) (Meleong, 2013: 173).

Untuk menjamin keabsahan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dicek keabsahannya melalui metode triangulasi yaitu teknik-teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data–data itu. Dalam hal ini triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui data lain yaitu dengan cara membandingkan data mengecek baik derajat kepercayaan sesuai informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif menurut Patton (dalam Meleong, 2013: 178). Teknik pemeriksaan keabsahan data itu dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang–orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan cara sebagai berikut yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Untuk lebih jelasnya maka dapat digambarkan dalam bagan triangulasi sebagai berikut.



Gambar 3.2. Triangulasi

Adapun alasan peneliti menggunakan triangulasi tersebut adalah:

- a. Untuk memperoleh data yang sama atau sejenis dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Untuk memperoleh data yang sama, atau sejenis dalam tujuan dan manfaat penelitian.

3.8 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam empat tahap, yaitu tahap sebelum kelapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan. Pada tahap pertama pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan atau diperlukan peneliti sebelum terjun dalam kegiatan penelitian yaitu:

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Mempertimbangkan secara konseptual, teknis serta logistik terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian
3. Membuat surat izin penelitian
4. Latar penelitian dan nilai guna serta melihat dan sekaligus mengenal unsur-unsur sosial dan keadaan alam latar penelitian
5. Menentukan informasi yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat tertentu
6. Mempersiapkan perlengkapan penelitian
7. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika terutama berkaitan dengan tatacara peneliti berhubungan dengan masyarakat atau dalam hal ini warga sekolah harus menghormati seluruh nilai yang ada didalam masyarakat.

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan peneliti dengan bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk memahami latar

penelitian. Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki oleh peneliti dipersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian.

Tahap ketiga yaitu analisis data. Setelah semua data yang diperoleh dilapangan terkumpul maka peneliti akan mereduksi serta menyajikan data tersebut setelah ini dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Setelah tahap analisis data selesai dan telah diperoleh kesimpulan, penulis masuk tahap keempat yaitu penulisan laporan. Dalam penulisan laporan penelitian sesuai dengan hasil yang diperoleh dilapangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah Metro Pusat dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah, selain itu komite sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran atau dana yang diperoleh sekolah, memberikan masukan tentang rancangan kerja anggaran sekolah (RKAS), menyelenggarakan rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RKAS), pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RKAS bersama kepala sekolah.
- 5.1.2 Peran komite sekolah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya di SD Muhammadiyah Metro, yaitu yang berwujud finansial misalnya menggalang dana dalam pembangunan gedung, sarana dan prasarana, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sangat terlihat jelas. Keberadaan komite sekolah di SD Muhammadiyah Metro yang membantu pihak sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan dinilai berperan positif. Telah bekerja sama

dengan masyarakat, orang tua, guru pihak sekolah, dan instansi-instansi lainnya.

- 5.1.3 Bentuk mengawasi pelayanan pendidikan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah, melakukan penilaian terhadap kualitas kebijakan yang diambil sekolah, melakukan mengawasi pelayanan pendidikan terhadap proses dan kualitas perencanaan dan program sekolah, melakukan mengawasi pelayanan pendidikan terhadap organisasi sekolah, melakukan mengawasi pelayanan pendidikan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah dan melakukan mengawasi pelayanan pendidikan terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah.
- 5.1.4 Peran komite sebagai menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi siswa, kepala sekolah dengan dewan pendidikan serta kepala sekolah dengan sekolah itu sendiri dalam hal ini guru, staf karyawan dan siswa, selain itu komite juga ikut serta dalam membuat usulan kebijakan dan beberapa program pendidikan kepada sekolah. Menjadi penampung aspirasi masyarakat dalam hal ini berupa pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah.

5.2 Saran-saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian tesis, maka diakhir penelitian ini diberikan saran yang kemungkinan dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya, antara lain:

- 5.2.1 Peran dan fungsi komite sekolah dalam melakukan peningkatan kinerjanya baik secara administratif berupa pembagian *job description*, pembuatan

program kerja, maupun secara keaktifan kinerja sudah berjalan baik hanya saja perlu ditingkatkan lagi agar peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di SD Muhammadiyah tetap terlaksana dengan baik.

- 5.2.2 Prosedur pembentukan komite sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan sekolah harus benar-benar dapat mewakili semua unsur, komponen dan elemen masyarakat yang benar-benar peduli dengan peningkatan mutu sekolah atas dasar berkeadilan, demokratis, akuntabel, transparan dan jelas peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu sekolah.
- 5.2.3 Program komite sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan sekolah harus dapat terrealisasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi misi sekolah dan harus didukung dengan segenap sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu sekolah sehingga pada gilirannya mampu mewujudkan visi dan misi sekolah tepat pada objeknya.
- 5.2.4 Usaha komite sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan sekolah harus dapat terrealisasi sesuai dengan program komite sekolah yang diarahkan dalam peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan.
- 5.2.5 Hasil komite sekolah dalam peningkatan mutu sekolah perlu pemikiran lebih lanjut dalam paradigma baru agar kualitas mutu, prestasi-prestasi yang sudah dicapai mampu bertahan. Apabila perlu harus ada pembaharuan dalam sistem pelaksanaannya yang didukung oleh manajemen pendidikan yang menuju pada manajemen mutu berbasis sekolah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Shoraku. 2008. *Educational Movement Toward School-Based Management in East Asia*. Japan: Kagawa University.
- Akdon. 2006. *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta, hal. 94-95
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- David, R. Fred. 2004. *Konsep Manajemen Strategis*, Edisi VII (terjemahan). Jakarta, PT Indeks. Hal. 24
- Djamarah, Bahri, Syaiful. 2007. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Reneka Cipta
- Depdiknas. 2002. *Manajemen Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen
- Depdiknas. 2005. *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005
- Depdiknas. 2007. *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: Permendiknas No. 19 tahun 2007
- E, Mulyasa. 2013, *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____ . 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____ . 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____ . 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____ . 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada) hlm. 96-98

- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Harsono. 2008. *Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 121
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 11
- Hamzah B. Uno. 2010. *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ismail, M. Yusanto. 2003. *Pengantar Manajemen Syariat*, Cetakan II. Jakarta, Khairul Bayan. Hal. 5
- Johnson, R.A. 2007. *The Theory and Management of System*. Tokyo: McGraw Hill Kogakusha. Hal. 2
- Kemdiknas. 2002. *Tentang komite sekolah*
- Mondy, R.W. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi kesepuluh (terjemahan). Jakarta: penerbit Erlangga. Hal. 3
- Meleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya) hal. 4
- Miles. 2004. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Matry, Nurdin. 2008. *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*, (Makasar: Aksara Madani, 2008), h. 10-11
- Muhyi, Dindin MZ (2007), Jurnal: *Pendidikan di Indonesia Harus Berlandaskan Jati Diri Bangsa*, Bandung: Al Mizan, hal. 4
- Nurkholis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 Tahun 2016

- Pantjastuti, Sri renani dkk..2008 *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publishing hlm 95
- Rusyan, A. Tabrani. 2015. *Manajemen Kependidikan*. Bandung: Media Pustaka. Hal. 56
- Rohiat, D. 2008. *Manajemen Sekolah*: Bandung: PT refika Aditama.
- Sagala, Syaiful. 2009. *Kemampuan Profesioanal Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sallis, Edward. 2008. *Total Quality Management In Education*, terjemahan Dr. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, M.Ag dan (Yogyakarta: IRCISOD), hlm.29.
- Sari, E. E. P. 2014. *Tentang Peran Komite Sekolah dalam Mendukung Peningkatan Mutu SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta*.
- Suparlan. 2008. *Membangun Sekolah yang efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Suharno. 2008. *Manajemen Pendidikan: Sebuah Pengantar bagi Para Calon Guru*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UPT Penerbit dan Percetakan UNS.
- Sukmadinata dkk. 2008. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrument)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Supardi, M. d. 2006. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press.
- Sutarto, M., Darmansyah, D., & Warsono, S. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah*. *The Manager Review Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13 (3), 343-355.
- Sutisna, Oteng. 2008. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Angkasa. Hal 22-27
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung Alfabeta
- Syarif Hidayatullah. 2013. *Peran Komite Sekolah dalam Mengembangkan Sarana Prasarana di SMP Darussalam Ciputat*.
- Tilaar, H,A,R. 2009. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta) h. 109
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)* Bandung: Fokusmedia
- Undang – Undang No 20 Tahun 2000-2004 Tentang Keputusan Mendiknas

- Wardiah, S., Murniati & Djailani. 2015. *Tentang Strategi Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga*.
- Wikipedia. 2009. *Tentang manajemen berbasis sekolah*. Diambil tanggal 27 Oktober 2011, dari <http://Manajemen Berbasis Sekolah: Model Strategi Mengembangkan Keunggulan Berbasis Kolaborasi>.
- Winoto, Suhadi. 2011. *Aplikasi Model dalam Penelitian Manajemen*. PT. Indeks. Jakarta
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yusak, Jailani Md. 2010. *Parent Participation and School Child Education Quality in Secondary School in Nigeria*, International journal of education and research vol. 2 no. 6 june 2014
- Zamroni. 2007. *Meningkatkan Mutu Sekolah, Teori, Strategi dan Prosedur*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah